

**A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>X</b>		<b>URUSAN KETENAGAKERJAAN</b>					
<b>A.</b>		<b>Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</li> <li>2. Pembinaan dan Pemantauan perencanaan Tenaga Kerja Daerah</li> <li>3. Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta</li> </ol>	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
<b>B.</b>		<b>Perencanaan Tenaga Kerja</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Tenaga Kerja Makro <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</li> <li>2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</li> <li>3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</li> <li>2) Pembinaan dan pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</li> <li>3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah</li> </ol> </li> <li>b. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta</li> <li>2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta</li> <li>3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
<b>C.</b>		<b>Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas</b>					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>1. Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan</p> <p>a. Pengembangan Standarisasi Kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerapan Standar Kompetensi</li> <li>2) Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi</li> <li>3) Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pelatihan Ketenaga kerjaan</li> <li>- Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan</li> </ul> </li> <li>4) Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan</li> <li>- Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan</li> </ul> </li> <li>5) Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pelatihan Ketransmigrasian</li> <li>- Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian</li> </ul> </li> </ol> <p>b. Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Akreditasi dan Sistem Informasi kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</li> <li>- Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan</li> </ul> </li> <li>2) Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan</li> <li>- Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas</li> </ul> </li> <li>3) Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar Mutu Lembaga Pelatihan</li> <li>- Bimbingan Penerapan Standar Mutu</li> </ul> </li> <li>4) Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Negara <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem Pendanaan Pelatihan</li> <li>- Kerjasama Antar Lembaga</li> </ul> </li> </ol> <p>c. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah</li> </ul> </li> </ol>	<p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah</li> <li>2) Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta</li> <li>- Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta</li> </ul> </li> <li>3) Tenaga Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan</li> <li>- Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan</li> </ul> </li> <li>4) Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan</li> <li>- Penyebaran Informasi Instruktur, PSM dan Tenaga Pelatihan</li> </ul> </li> </ul> <p>d. Bina Pemagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemagangan Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pemagangan dalam negeri</li> <li>- Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri</li> </ul> </li> <li>2) Pemagangan Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pemagangan dalam negeri</li> <li>- Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri</li> </ul> </li> <li>3) Perizinan dan Advokasi Pemagangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perizinan dan Rekomendasi</li> <li>- Advokasi dan Perlindungan</li> </ul> </li> <li>4) Promosi dan Jenjang Pemagangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan</li> <li>- Pemagangan Jejaring Pemagangan</li> </ul> </li> </ul> <p>e. Produktivitas dan Kewirausahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promosi Produktivitas dan Kewirausahaan</li> <li>- Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan</li> </ul> </li> <li>2) Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem dan Metode Produktivitas</li> <li>- Alat dan Teknis Peningkatan Produktivitas</li> </ul> </li> <li>3) Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengukuran Produktivitas</li> <li>- Kajian Produktivitas</li> </ul> </li> <li>4) Pengembangan Kewirausahaan</li> </ul>	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
D.		- Pelatihan Manajemen Kewirausahaan - Bimbingan Konsultasi					
		<b>Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja</b>					
		1. Pengembangan Pasar Kerja					
		a. Informasi Pasar Kerja	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		b. Analisis Pasar Kerja	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		c. Bursa Kerja	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		d. Analisis Jabatan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		2. Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri					
		a. Antar Kerja	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		1) Penempatan Tenaga Kerja antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL) 2) Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja					
		b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		1) Penempatan Tenaga Khusus Muda dan Wanita 2) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia					

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan  d. Pemberdayaan Pengantar Kerja 1) Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja 2) Kerjasama antar Lembaga 3. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri a. Kelembagaan Penempatan 1) Perizinan Kelembagaan 2) Evaluasi Kinerja b. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 1) Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI 2) Fasilitas Penyediaan TKI c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 1) Advokasi dan Kepulangan 2) Sarana dan Perlindungan d. Kerjasama Internasional 1) Kerjasama Bilateral 2) Kerjasama Regional dan Multilateral 4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	Biasa/terbuka  Biasa/terbuka  Biasa/terbuka  Biasa/terbuka  Biasa/terbuka  Biasa/terbuka  Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal  Pengguna internal dan eksternal  Pengguna internal dan eksternal  Pengguna internal dan eksternal  Pengguna internal dan eksternal  Pengguna internal dan eksternal	Terbuka  Terbuka  Terbuka  Terbuka  Terbuka  Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.  Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.  Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.  Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.  Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.  Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait  Unit Pengolah Terkait  Unit Pengolah Terkait  Unit Pengolah Terkait  Unit Pengolah Terkait  Unit Pengolah Terkait



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
E.		2) Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Biasa					
		c. Pengendalian Kerjasama Kelembagaan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		6. Standardisasi Profesi					
		a. Sistem Informasi dan Registrasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		1) Dokumen yang berhubungan dengan Sistem Informasi dan Registrasi					
		2) Dokumen yang berhubungan dengan Sertifikasi Kompetensi Kerja					
		b. Pembakuan Akreditasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		1) Dokumen yang Berhubungan dengan kompetensi dan Akreditasi Kelembagaan Sertifikasi					
		2) Dokumen yang Berhubungan dengan penyelenggaraan kopensi dan persi dangan					
		<b>Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</b>					
		1. Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi					
		a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama Bersama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Perjanjian Kerja  c. Kesejahteraan Pekerja 1) program Kesejahteraan 2) fasilitas kesejahteraan  d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja 1) Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja 2) Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja 2. Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial  a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha 1) Organisasi Pekerja 2) Organisasi Pengusaha	Terbatas          Biasa/terbuka          Biasa/terbuka          Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum          Pengguna internal dan eksternal          Pengguna internal dan eksternal          Pengguna internal dan eksternal	tertutup          Terbuka          Terbuka          Terbuka	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.          Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.          Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.          Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait          Unit Pengolah Terkait          Unit Pengolah Terkait          Unit Pengolah Terkait



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Kelembagaan Hubungan Industrial  1) Lembaga Kerjasama BIPARTIT 2) Lembaga Kerjasama TRIPARTIT  c. Pemasyarakatan Hubungan Industrial  1) Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial 2) Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial 3. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  a. Pengupahan  1) Penerapan Standar Pengupahan 2) Pengurusan Pengupahan  b. Jaminan Sosial Tenaga kerja dalam Hubungan Kerja  1) Pengurusan Jamsostek dalam Hubungan Kerja 2) Kepesertaan Jamsostek dalam Hubungan Kerja 4. Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial  a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial  1) Pencegahan Dini	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
F.		2) Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan					
		b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		1) Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial 2) Evaluasi Pelaporan					
		c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1) Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan 2) Kelembagaan dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		<b>Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b> 1. Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)					
		a. Pengkajian K3	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		1) Analisis dan Standardisasi Bidang K3 2) Hasil Kajian Perekayasa dan Penerapan Teknologi K3 3) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3					
		b. Bimbingan Teknis dan Evaluasi K3	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		2. Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
G.		a. SDM K3	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		1) Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 2) Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					
		b. Kompetensi K3	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		1) Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 2) Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 3) Kerjasama Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 4) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					
		<b>Laporan Statistik Ketenagakerjaan</b>	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		1. Laporan Statistik Bulanan, Triwulan dan Semester 2. Laporan Statistik Tahunan					